



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages : 2592–2600

Hubungan Antara Kepemimpinan Partisipatif dan Penerimaan Kebijakan Publik

Dina Dwi Apriani, Eli Apud Saepudin, Siti Aminatul Zahro, Diana,
Alya Rahmah, Shella Anggraeni

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index
DOI	: https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2925

How to Cite this Article

APA	: Apriani, D. D., Saepudin, E. A. ., Zahro, S. A., Diana, Rahmah, A., & Anggraeni, S. (2025). Hubungan antara Kepemimpinan Partisipatif dan Penerimaan Kebijakan Publik. <i>Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research</i> , 2(1b), 2592 – 2600. https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2925
Others Visit	: https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Hubungan Antara Kepemimpinan Partisipatif dan Penerimaan Kebijakan Publik

Dina Dwi Apriani¹, Eli Apud Saepudin², Siti Aminatul Zahro³, Diana⁴, Alya Rahmah⁵,
Shella Anggraeni⁶

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email:

dinadwiapri24@gmail.com¹, eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id², sitiaminatulzahro20@gmail.com³,
dianaferiska6@gmail.com⁴, rahmahalya48@gmail.com⁵, shellaangraeni30@gmail.com⁶

Diterima: 15-01-2025

| Disetujui: 16-01-2025

| Diterbitkan: 17-01-2025

ABSTRACT

This study analyzes the correlation between participatory leadership styles and the level of community acceptance of government policies. Through a quantitative approach, this study aims to reveal the extent to which citizen involvement in public decision-making can increase policy acceptance. Participative leadership plays an important role in the acceptance of public policies by increasing the involvement of subordinates in decision-making. leadership style that involves the active participation of various stakeholders in the decision-making process. In the context of public policy, this participatory approach is considered capable of increasing the legitimacy, transparency, and accountability of policies, as well as accommodating the needs and aspirations of the community. This research aims to analyze the relationship between participatory leadership and the effectiveness of public policy implementation. Through a qualitative approach, this research examines how the involvement of various actors, including the community, private sector, and non-governmental organizations, can influence the success of public policies. This style encourages two-way communication building trusting relationships all of which can increase organizational commitment. The research shows that participatory leadership can improve performance and the relationship between participatory leadership and public policy acceptance is positive and mutually beneficial.

Keywords: *participative leadership, community involvement, public policy acceptance*

ABSTRAK

Studi ini menganalisis korelasi antara gaya kepemimpinan partisipatif dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik dapat meningkatkan penerimaan kebijakan. Kepemimpinan partisipatif berperan penting dalam penerimaan kebijakan publik dengan meningkatkan keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan. gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan partisipatif ini dianggap mampu meningkatkan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan, serta mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepemimpinan partisipatif dengan efektivitas implementasi kebijakan publik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana keterlibatan berbagai aktor, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah, dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Gaya ini mendorong komunikasi dua arah membangun hubungan yang saling percaya semua ini dapat meningkatkan komitmen organisasi Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif dapat memperbaiki kinerja dan hubungan antara kepemimpinan partisipatif dan penerimaan kebijakan publik adalah positif dan saling menguntungkan.

Kata kunci : kepemimpinan partisipatif, keterlibatan masyarakat, penerimaan kebijakan publik

PENDAHULUAN

Kepemimpinan partisipatif adalah pendekatan yang melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, menciptakan kolaborasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Menurut Ranupandojo, kepemimpinan ini mendorong konsultasi dan pembagian kekuasaan, yang penting untuk mencapai kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Burhanuddin menekankan bahwa kepemimpinan partisipatif memungkinkan pengaruh bawahan dalam keputusan, meningkatkan komitmen dan dukungan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Dengan demikian, hubungan antara kepemimpinan partisipatif dan penerimaan kebijakan publik sangat erat, karena partisipasi aktif memperkuat legitimasi dan efektivitas kebijakan tersebut (Mustanir & Yasin, 2018).

Gaya kepemimpinan merupakan hal yang penting dan utama untuk berjalannya suatu organisasi. Setiap diri manusia memiliki keterbatasan dimana hal tersebut membutuhkan seseorang untuk melengkapinya, maka dalam sebuah organisasi memimpin dan dipimpin merupakan suatu kebutuhan. Kepemimpinan dicirikan sebagai suatu cara atau sikap individual, kebiasaan, serta cara mempengaruhi suatu individu kepada individu lain melalui suatu interaksi. Seorang pemimpin mempunyai cara serta ciri tersendiri dalam proses kepemimpinan mereka disebuah organisasi, maka dari itu gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi proses kegiatan dan tujuan organisasi tersebut. Dengan adanya peran pemimpin dalam melaksanakan pembangunan mental spiritual dan melalui penerapan pembangunan pemikiran yang diterapkan kepada masyarakat, tampaknya akan mungkin untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Mardiyanta, 2013).

Peran pemimpin dalam mencapai sebuah tujuan organisasi tentu hal ini dapat disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang dipilih oleh pemimpin tersebut (Setiadi, W., & Heru, 2021). Dalam lanskap pemerintahan modern, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat. Kebijakan yang dirancang secara matang pun dapat menghadapi tantangan jika tidak didukung oleh partisipasi aktif dari masyarakat. Di sinilah peran kepemimpinan partisipatif menjadi sangat krusial. Kepemimpinan partisipatif, yang menekankan pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, telah terbukti mampu meningkatkan signifikansi penerimaan kebijakan publik.

Hubungan antara kepemimpinan partisipatif dan penerimaan kebijakan publik merupakan sebuah simbiosis mutualisme. Di satu sisi, kepemimpinan partisipatif menciptakan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, ide, dan bahkan kritik terhadap kebijakan yang sedang dirancang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memberikan rasa memiliki bagi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, penerimaan kebijakan yang tinggi akan memberikan legitimasi bagi pemimpin dan memudahkan proses implementasi kebijakan (Permana & Karwanto, 2020).

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Lestari, 2018).

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks

permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut (Audah & Saragih, 2015).

Analisa kebijakan perlu dilakukan, terutama berkenaan dengan dampak yang dihasilkannya. Kajian pelaksanaan kebijakan bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan merugikan kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ilmiah ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bersumber dari jurnal, skripsi, studi perpustakaan, media cetak, media elektronik dari berbagai sumber yang relevan.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (Pradina Nugraha et al., 2020) adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan keadaan yang ada pada perusahaan berdasarkan fakta, sifat-sifat populasi berdasarkan data- data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis selanjutnya dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Sedangkan penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Hanifah nilau putri et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan partisipatif menurut peneliti adalah suatu bentuk kepemimpinan yang menyangkut usaha seorang pemimpin untuk mendorong dan memfasilitasi partisipasi bawahan dalam mengambil keputusan maupun kebijakan organisasi di Ika Darma Ayu. secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan didalam menjalankan kepemimpinannya (Halawa & Ndraha, 2023).

Menurut Burhanuddin dalam bukunya administrasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan, mendefinisikan gaya kepemimpinan partisipatif sama pengertiannya dengan kepemimpinan demokratis, yaitu seorang pemimpin mengadakan konsultasi dengan para bawahannya mengenai tindakan-tindakan keputusan-keputusan diusulkan atau dikehendaki oleh pimpinan, serta berusaha memberikan dorongan untuk turut serta aktif melaksanakan semua keputusandan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan (Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Kepemimpinan menurut Kreith dan Knicki (Puji Iskandar, 2023) bahwa Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara sukarela. Pengertian ini menekankan kepada kemampuan pemimpin yang tidak memaksa dalam menggerakkan anggota organisasi agar mau melakukan pekerjaan/kegiatan yang terarah pada tujuan organisasi. Artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh tauladan yang baik agar dengan sendirinya anggotanya akan mengikutinya.

Menurut Brown, et. al. (2005) dalam Toor dan Ofori (2009) menemukan bahwa kepemimpinan

etis dikaitkan dengan perilaku pertimbangan, kejujuran, kepercayaan pemimpin, keadilan interaksional, dan kepemimpinan kharismatik yang disosialisasikan. Penyelidikan ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan etis memprediksi hasil seperti efektivitas yang dirasakan dari para pemimpin, kepuasan karyawan dengan pekerjaan, dan kesediaan mereka untuk usaha ekstra dalam pekerjaan, dan untuk melaporkan masalah kepada manajemen (Zulkifli, 2013).

Mitch Mc Crimmon (2007) menulis bahwa menjadi pemimpin yang partisipatif berarti melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Hal ini terutama penting manakala pemikiran kreatif diperlukan untuk memecahkan masalah yang kompleks atau membuat keputusan yang akan berdampak pada anggota tim. Gaya Kepemimpinan Partisipatif lebih menekankan kepada tingginya dukungan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan tetapi sedikit pengarahan (Damanik, 2024).

Menurut Widjaja pengungkapan partisipasi mempunyai beberapa ciri, antara lain: Menurut tujuannya, partisipasi dapat berupa mobilisasi yang bertujuan hanya mendukung apa yang telah ditetapkan dari atas. Bila kebijaksanaan dari atas kurang sempurna atau membawa keruntuhan, maka semua yang dimobilisir juga akan ikut runtuh. Partisipasi dapat pula berupa saling penunjang. Dalam hal ini, partisipasi mengandung tidak hanya dukungan tapi juga koreksi dan pengisian kekurangan. Menurut frekuensinya, partisipasi dapat dilakukan sekali-kali saja. Partisipasi yang sesekali dapat merusak sistem bilamana pencetusannya disebabkan kekecewaan yang sudah lama dikandung dalam hati anggota- anggota masyarakat. Frekuensi partisipasi dapat pula bersifat terus-menerus (continue) secara periodik (Iskandar, 2017).

Victor H. Vroom dan Phillip W. Yetton (1973) Vroom dan Yetton mengajukan model Dalam suatu organisasi yang dimana pemimpinnya menggunakan gaya partisipatif dalam mengambil keputusan yang meningkatkan gaya kepemimpinan. Model ini melibatkan lima tahap dalam tingkat partisipasi yang semakin meningkat, yaitu pemimpin mengambil keputusan sendiri, pemimpin mengumpulkan informasi dari bawahan, pemimpin berdiskusi dengan bawahan, pemimpin mengambil keputusan bersama dengan bawahan, dan pimpinan memberikan otoritas kepada orang yang dipimpinnya dalam berkontribusi menentukan sebuah keputusan (Yusuf et al., 2020). Karena pada model kepemimpinan sebagai proses memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Karena baik pemimpin maupun pengikut adalah bagian dari proses kepemimpinan, maka penting untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para pengikut serta isu-isu yang dihadapi para pemimpin (Rehan & Pramono, 2024). Munculnya masalah baik internal maupun eksternal dikarenakan kurang tepatnya pengambilan keputusan (Yusuf et al., 2020).

Adapun partisipasi merupakan kemampuan mendengarkan secara bijak aspirasi warga negara, karena salah satu kelemahan warga negara adalah mereka sulit untuk mengartikulasikan kebutuhan (dan kepentingan) mereka. Jadi, dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semua elemen, semua pemangku kebijakan harus bisa memahami dan membantu masyarakat atas apa yang sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan (Haliim, 2020).

Adapula Situasi seperti dijelaskan oleh Fiedler dalam (Setiawan & Tri Harsanto, 2016) melalui model kontingensi dari efektivitas kepemimpinan yang dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Fiedler memberikan perhatian mengenai pengukuran orientasi kepemimpinan dari seorang individu. kondisi situasi terdiri dari tiga faktor utama, yaitu: hubungan pemimpin-anggota, struktur tugas dan kekuatan posisi.

Pada kepemimpinan partisipatif ini melibatkan usaha-usaha manajer untuk mendorong dan memudahkan partisipatif orang lain dalam pengambilan keputusan yang penting (KOMARUDIN, 2016). Kepemimpinan partisipatif memperlihatkan yang memiliki beberapa indikator, yaitu pimpinan bisa mengerti dirinya dengan baik, pimpinan dapat berpikir atau memiliki hati yang terbuka, pimpinan berpikir secara tersusun rapi, berani menghadapi resiko yang besar, pimpinan memiliki daya tahan yang baik tentu pantang menyerah, serta yang terpenting adalah pimpinan terbuka melakukan berbagai perubahan (Darmawan & Zakka, 2022).

Menurut penelitian Goh Yuan et al. gaya kepemimpinan secara signifikan dipengaruhi oleh pemimpin keluarga dekat, keluarga, klan dan suku. Pelajaran ini menemukan hubungan antara kepemimpinan organisasi dan etika bisnis, dengan demikian memberikan kontribusi meningkatkan kualitas kehidupan organisasi yang mungkin memiliki pengaruh positif pada kedua anggota organisasi dan masyarakat luas (Purwanto et al., 2020).

Selain mempunyai beberapa indikator-indikator kepemimpinan partisipatif juga mempunyai gaya kepemimpinan partisipatif yang merupakan gaya kepemimpinan dengan cara memimpin memberikan kesempatan kepada bawahan untuk ikut secara aktif baik mental, spiritual, fisik, maupun material dalam kiprah diorganisasi (Hayya, 2021). Gaya kepemimpinan partisipatif menyangkut usaha-usaha seorang pemimpin untuk mendorong dan memudahkan partisipasi oleh orang lain dalam membuat keputusan-keputusan yang tidak dibuat oleh pemimpin itu sendiri. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah seorang pemimpin yang mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Berbagai ahli menjelaskan ciri utama model atau gaya kepemimpinan partisipatif, misalnya (1) seorang pucuk pimpinan bisa berkomunikasi dua arah dengan baik; (2) pucuk pimpinan bisa menjadi pendengar yang baik serta memberikan respon terbaik terhadap berbagai hal yang dialami oleh orang-orang yang dipimpinnya; (3) seorang pemimpin dapat melibatkan orang-orang yang dipimpinnya dalam pembuatan keputusan yang penting. Ciri-ciri tersebut merupakan gambaran kepemimpinan partisipatif dalam sebuah organisasi multidimensi (Darmawan & Zakka, 2022).

Kepemimpinan partisipatif juga memberikan berbagai manfaat, akan tetapi manfaat tersebut bergantung pada siapa partisipannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh apa yang mereka miliki, dan aspek lain dalam pengambilan keputusan. Terdapat empat manfaat potensial meliputi kualitas keputusan yang meningkat oleh para partisipan, kepuasan yang tinggi oleh partisipan, kepuasan lebih atas proses keputusan, dan pengembangan keterampilan membuat keputusan (Permana & Karwanto, 2020).

Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam pembangunan karena didasarkan beberapa dua hal, pertama, karena keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memadukan atau mengawinkan model top down dengan bottom up agar program atau kebijakan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhannya (Haliim, 2020). Kepemimpinan partisipatif ada dalam organisasi dengan berbagai ukuran, jenis, dan tahap apa pun, di mana keterbukaan dan pemberdayaan karyawan dalam proses pengambilan keputusan organisasi merupakan karakteristik inti yang membedakannya dari gaya kepemimpinan lainnya (Halimatusha'diah & Rajabi, 2023).

Kepemimpinan partisipatif berhubungan dengan penggunaan berbagai prosedur keputusan yang memperbolehkan pengaruh orang lain mempengaruhi keputusan pemimpin. Istilah lain yang biasa digunakan untuk mengacu aspek-aspek kepemimpinan partisipatif termasuk konsultasi, pembuatan keputusan bersama, pembagian kekuasaan, desentralisasi, dan manajemen demokratis (Andriani Lestari,

2019).

Kepemimpinan partisipatif saat ini banyak digunakan dalam organisasi-organisasi dibidang pendidikan, seperti sekolah-sekolah, asosiasi-asosiasi guru, asosiasi kepala sekolah, dan sebagainya. Salah satu contoh penelitian relevan yang menggambarkan penerapan kepemimpinan partisipatif adalah pada SMA Labschool Kebayoran Baru, Jakarta, di mana Kepala Sekolah pada SMA ini menerapkan model partisipatif dalam kepemimpinannya dengan melibatkan para guru dan wakil-wakil kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Kepala Sekolah juga beberapa kali mendelegasikan wewenangnya kepada wakil yang ditunjuk apabila tidak dapat hadir dalam rapat-rapat untuk menentukan keputusan (Halimatusha'diah & Rajabi, 2023).

Kurang tepatnya keputusan yang diambil oleh pemimpin akan membuat anggota organisasi merasa kurang nyaman dalam bekerja sehingga menimbulkan rasa malas dan tidak termotivasi (Yusuf et al., 2020).

Ada juga yang mengatakan bahwa partisipasi merupakan kemampuan mendengarkan secara bijak aspirasi warga negara. Karena salah satu kelemahan warga negara adalah mereka sulit untuk mengartikulasikan kebutuhan (dan kepentingan) mereka. Jadi, dalam memahami partisipasi masyarakat dalam pembangunan, semua elemen, semua pemangku kebijakan harus bisa memahami dan membantu masyarakat atas apa yang sebenarnya yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan (Haliim, 2020).

Pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam mengakses pesan-pesan politik, baik langsung maupun melalui media, sangat mempengaruhi efektifitas komunikasi politik, pola komunikasi yang diterapkan oleh pemimpin daerah sangat mempengaruhi efektivitas hubungan publik dan keberhasilan program Pembangunan (Wiryany et al., 2024).

KESIMPULAN

Kepemimpinan partisipatif memiliki hubungan yang positif dengan efektivitas kebijakan publik. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendorong keterlibatan dan komitmen publik dalam mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kepemimpinan partisipatif membantu dalam membangun konsensus dan mengurangi potensi konflik di masyarakat, sehingga menciptakan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang.

Kepemimpinan partisipatif berperan juga penting dalam meningkatkan penerimaan kebijakan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemimpin dapat memahami kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan efektif. Partisipasi publik membantu mengurangi kesenjangan antara harapan masyarakat dan hasil kebijakan, menciptakan rasa memiliki yang lebih besar terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, empati dan komunikasi yang baik antara pemimpin dan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kebijakan publik yang sukses dan diterima luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Lestari. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Dan Komitmen Organisasi Terhadap Efektifitas Implementasi Rencana Strategik Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 23(1), 115. <https://doi.org/10.17509/jap.v23i1.5580>
- Audah, A., & Saragih, S. (2015). Politik Organisasi dalam Latar Sumber-Sumber Kekuasaan di Lingkungan Kerja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 4(03), 259–273. <https://doi.org/10.30996/persona.v4i03.721>
- Damanik, N. (2024). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Lurah terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun*. x(x), 14–25.
- Darmawan, P. A., & Zakka, M. F. Q. (2022). Analisis Model Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah Penggerak Dalam Transformasi Pendidikan Era Digital. *Seminar Pendidikan Nasional Administrasi Pendidikan*, 1, 59–70.
- Halawa, S., & Ndraha, A. B. (2023). Analisis Pengoptimalan Kepemimpinan Partisipatif Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2Kp) Gunungsitoli. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(3), 1882–1898. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i3.52457>
- Haliim, W. (2020). Kebijakan Pembangunan Dalam Konsep Kepemimpinan Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104. <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.108>
- Halimatusha'diah, & Rajabi, M. A. (2023). Implementasi Kepemimpinan Partisipatif Pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Geografi Sma Kabupaten Karawang. *PANDU: Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum*, 1(3), 152–159. <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i3.416>
- Hanifah nilau putri, Abdul Harits, Hafidh Al Arief, & Jesica Anggia Fahrezy. (2022). Analisis Gaya Kepemimpinan (Studi Di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Bidang Pengelolaan Daerah Sungai Dan Hutan Lindung). *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 11(2), 41–53. <https://doi.org/10.37304/jispar.v11i2.4921>
- Hayya, Y. M. (2021). *Pengaruh gaya kepemimpinan partisipatif terhadap komitmen organisasi dimediasi motivasi kerja pada PT. Bank Muamalat Indonesia*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/29700/>
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi Dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- KOMARUDIN, N. P. M. E. (2016). ... Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Sekolah Menengah Atas (Sma) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) 1(1), 61–79. [http://repository.unpas.ac.id/14171/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/14171/1/JURNAL Disertasi EDEN TERBUKA.docx](http://repository.unpas.ac.id/14171/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/14171/1/JURNAL%20Disertasi%20EDEN%20TERBUKA.docx)
- Lestari, A. (2018). Kepemimpinan Partisipatif, Komitmen Organisasi Dalam Efektifitas Implementasi Rencana Strategik. *Jurnal Pijar: Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 58–66. <https://ejournal-leader.com/index.php/pijar/article/view/176%0Ahttps://ejournal-leader.com/index.php/pijar/article/download/176/78>
- Mardiyanta, A. (2013). State of the art: Konsep partisipasi dalam ilmu administrasi publik. *Masyarakat, Kebudayaan*, 26(No. 4 Published : 2013-10), 227–242. <http://journal.unair.ac.id/state-of-the-art-article-8748-media-15-category-8.html>

- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Community Participation in Transect on Development Planning. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 137. <https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>
- Permana, A. W., & Karwanto, K. (2020). Gaya Kepemimpinan Partisipatif Dalam Upaya Meningkatkan Profesional Guru. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 5(1), 58. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v5n1.p58-67>
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 13–44.
- Pradina Nugraha, R., Soeherlan S, L., & Jarkasih, A. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Aparatur Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. *JURNAL DIALOGIKA Manajemen Dan Administrasi*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.31949/dialogika.v2i1.2173>
- Puji Iskandar, W. S. Z. , R. A. U. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Dan Kedisiplinan Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 371–382. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3269%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/viewFile/3269/1577>
- Purwanto, A., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., Sihite, O. B., & Saifuddin, M. P. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif dan Otokratis Terhadap Kinerja Sistem Jaminan Halal HAS 23000 Pada Industri Makanan Kemasan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 156–179. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i1.345>
- Rehan, M., & Pramono, R. (2024). Model Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah SMP di Jakarta. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 4(1), 81–90. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i1.393>
- Setiadi, W., & Heru, S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(3), 1–16.
- Setiawan, J., & Tri Harsanto, B. (2016). Analisis Model Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Di Kabupaten Banjarnegara. *Public Policy and Managament Inquiry. Volume*, 1(1), 28–41.
- Wiryany, D., Aisyah, P. S., & Yuanita, A. S. (2024). Analisis Pola Komunikasi Ganjar Pranowo Dan Implikasinya Pada Efektivitas Hubungan Publik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 9(1), 21–39. <https://doi.org/10.35706/jpi.v9i1.11414>
- Yusuf, R., Hendawati, H., & Wibowo, L. A. (2020). Pengaruh Konten Pemasaran Shoppe Terhadap Pembelian Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 506–515. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Zulkifli, I. (2013). Kepemimpinan Transformasional dalam Proses Penerimaan dan Proses Seleksi Pemimpin Publik dalam Menciptakan Kepercayaan di Indonesia. *Binus Business Review*, 4(1), 370. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1127>